SKRIPSI

KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH: STUDI KELURAHAN BANING KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Program Studi Pembangunan Sosial

Oleh:

DISTA HANDAYANI

NIM: E1021221025

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH: STUDI KELURAHAN BANING KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Pembangunan Sosial

Oleh:

Dista Handayani

NIM: E1021221025

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH: STUDI KELURAHAN BANING KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tanggung Jawab Yuridis Pada

Dista Handayani
NIM. E1021221025

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Dr. H. Mukhlis, M.Si
NIP. 196311121989031002

Tanggal 2/6/2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Annisa Rizqa Alamri, S.S.T,M.A
NIP. 199205072022032012

Tanggal 2/6/2026

LEMBAR PENGESAHAN

KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH: STUDI KELURAHAN BANING KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:
Dista Handayani
NIM. E1021221025

Dipertahankan Di :
Pada Hari/Tanggal : Senin / 15 Juni 2026.
Waktu : 09.00 – 10.00 WIB
Tempat : Ruang 1.

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Mukhlis, M.Si
NIP.196311121989031002

Sekretaris

Dr. Annisa Rizqa Alamri, S.S.T,M.A
NIP. 199205072022032012

Penguji Utama

Drs. M. Sabran, M.Si
NIP. 196207091990021001

Penguji Pendamping

Reiki Nauli Harahap., M.A
NIP. 199411012022031008

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Dista Handayani 2026 : "Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah: Studi Kelurahan Baning Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat" **Skripsi Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura 2026.**

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kolaborasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Baning Kecamatan Sintang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa pengelolaan sampah merupakan masalah yang tak pernah berakhir karena faktor-faktor seperti peningkatan volume sampah, infrastruktur yang tidak memadai, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, dengan demikian, jelas bahwa pengelolaan sampah membutuhkan sistem kolaborasi yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan alat yang dipilih untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif deskriptif ini. Penelitian menggunakan teori kebijakan sosial Muhammad Lukman Hakim untuk meneliti data. Teori ini mempertimbangkan ketepatan tujuan kebijakan, kompetensi dan dedikasi pelaksana kebijakan, dan sejauh mana para aktor berkolaborasi dan berpartisipasi. Temuan menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup, petugas sanitasi, otoritas lingkungan, dan masyarakat bekerja sama untuk melaksanakan peraturan pengelolaan sampah di Kelurahan Baning Kecamatan Sintang. Penjangkauan, pelayanan masyarakat, penyediaan fasilitas sanitasi, dan pengangkutan sampah semuanya berperan dalam mewujudkan kemitraan ini. Kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan telah menjadi dasar tujuan kebijakan ini, yang didukung oleh dedikasi pemerintah terhadap layanan sanitasi dan penyuluhan berkelanjutan. Rendahnya pengetahuan masyarakat, kurangnya infrastruktur pendukung, dan kurangnya dana masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan, perlu meningkatkan koordinasi, memperluas kapasitas sumber daya, dan mendorong keterlibatan masyarakat.

Kata Kunci: Kolaborasi, Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah.

ABSTRACT

Dista Handayani (2026). "Government and Community Collaboration in the Implementation of Waste Management Policy: A Study in Baning Village, Sintang Sub-District, Sintang Regency, West Kalimantan Province." Undergraduate Thesis, Social Development Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, 2026.

The purpose of this research is to identify and analyze the forms of collaboration in the implementation of the waste management policy in Baning Village, Sintang District. This research was based on the view that waste management is an ongoing problem because of several factors, such as the increasing volume of waste, inadequate infrastructure, and the lack of community involvement in maintaining environmental cleanliness. Therefore, it is clear that waste management requires a collaborative system involving multiple stakeholders. This research used a descriptive qualitative research method. Observation, interviews, and documentation were used as the techniques for data collection. This research applied Muhammad Lukman Hakim's social policy theory to analyze the data. This theory focuses on the appropriateness of policy objectives, the competence and commitment of policy implementers, and the extent of collaboration and participation among the actors involved. The findings show that the Office of Environmental Affairs, sanitation workers, neighborhood authorities, and the local community collaborate in implementing the waste management policy in Baning Village, Sintang Sub-District. This collaboration is carried out through public outreach, community services, the provision of sanitation facilities, and waste collection activities. The policy objectives are based on community needs and local conditions. They are supported by the government's commitment to sanitation services and continuous public education. However, the implementation of the policy still faces several challenges, including the low level of public awareness, the lack of supporting infrastructure, and limited financial resources. To achieve effective and sustainable waste management, it is necessary to improve coordination, expand resource capacity, and encourage greater community participation.

Keywords: *Collaboration, Policy Implementation, Waste Management*



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah: studi Kelurahan Baning Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat". Studi ini di latarbelakangi oleh permasalahan sampah yang masih menjadi tantangan, ditandai dengan meningkatnya volume sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan. Rumusan masalah dalam studi ini adalah bagaimana bentuk kolaborasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Baning Kecamatan Sintang. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kolaborasi yang dilaksanakan oleh berbagai aktor dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian dilaksanakan menggunakan Teori Kebijakan Sosial Muhammad Lukman Hakim yang meliputi ketepatan perumusan tujuan kebijakan, kapasitas dan komitmen pelaksana kebijakan, serta tingkat partisipasi dan kolaborasi antaraktor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Baning Kecamatan Sintang telah melibatkan berbagai aktor,

yaitu Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan, aparat lingkungan, dan masyarakat. Bentuk kolaborasi yang dilaksanakan diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, kerja bakti atau gotong royong, penyediaan dan pemanfaatan fasilitas kebersihan, serta pengangkutan sampah. Perumusan tujuan kebijakan telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan, sedangkan komitmen pemerintah terlihat melalui penyediaan layanan kebersihan dan pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mengelola sampah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antaraktor, peningkatan kapasitas sumber daya, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat.

Saran dalam studi ini adalah Pemerintah Kabupaten Sintang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, perlu memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang mendukung pengelolaan sampah, serta memperluas program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan bank sampah, penerapan prinsip 3R secara konsisten, serta peningkatan kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, partisipatif, dan berkesinambungan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Dista Handayani
Nomor Mahasiswa	: E1021221025
Program Studi	: Pembangunan Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Dista Handayani

E1021221025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

In the Name of Jesus Christ

Motto:

"Selesaikan apa yang sudah dimulai, lewati saja badainya jangan ubah tujuannya"

"Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan"

(Yesaya 41:10)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus oleh berkat, kebaikan, anugerah dan kasih setia-Nya dalam hidup penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih karena sudah menggendong anakmu ini saat ia tidak mampu untuk melangkah maju dan menjadi sumber kekuatan di tengah ketidakpastian. Terima kasih sudah menjadi rumah bagi penulis untuk meneteskan air mata sukacita.
2. Kepada kedua Orang Tua Tercinta (Bapak Ebi dan Ibu Surya wati) orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi kepada anaknya. Mamak dan Bapak memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi kalian selalu berjuang untuk kehidupan anaknya, terima kasih sudah melahirkan, membesarkan, dan untuk semua berkat serta doa dan dukungan mamak dan bapak, saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Sehat selalu dan hidup lebih lama lagi.
3. Kepada adiku satu-satunya (Enjelia Rika) terima kasih sudah menjadi adik sekaligus teman yang bisa menjadi tempat berbagi, semoga yang kamu impikan Tuhan Yesus selalu memberi kelancaran.
4. Untuk diri saya sendiri (Dista Handayani) terima kasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar, yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang

ada. Terima kasih sudah selalu berjuang untuk menjadi lebih baik, dan bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Semoga ilmu yang telah ku dapatkan ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup, tetap semangat kamu pasti bisa.

5. Partner tersayang yang tak kalah penting kehadirannya terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, maupun materi. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup saya, selalu menemani dan meluangkan waktunya, mendukung atapun menghibur dalam kesedihan, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah untuk meraih impian. Harapan saya semoga kita bisa sukses bersama mengikuti apa yang telah kita impikan.
6. Keluarga besar, atas doa, dukungan, dan cinta yang senantiasa menguatkan di setiap langkah perjuangan ini. Terima kasih untuk kehangatan dan ketulusannya.
7. Terakhir teruntuk teman-teman dibangku perkuliahan (Astrid, Eprata, Dinda, dan Ima), terima kasih telah membersamai penulis selama masa perkuliahan ini. Terima kasih telah setia menemani, memberi motivasi dan selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan. Terima kasih telah mendukung, memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kesehatan, ketekunan, serta kesempatan untuk menyelesaikan Penelitian Skripsi yang berjudul "Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah: studi Kelurahan Baning Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat" Berkat rahmat dan tuntunan-Nya, seluruh proses penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

Selama penyusunan ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun melalui doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat merampungkan studi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Herlan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Syf. Ema Rahmaniah. M. Ed. selaku Ketua Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura.
3. Bapak Nurwijayanto, S.H., M.Si selaku Koordinator Program Studi Pembangunan Sosial, sekaligus dosen Pembimbing Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tanjungpura.
4. Kedua orang tua saya yang tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan suport dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Mukhlis, M.Si. selaku dosen pembimbing pertama.

6. Ibu Dr. Annisa Rizqa Alamri, S.S.T, M.A selaku dosen pembimbing kedua.
7. Bapak Drs. M. Sabran, M.Si selaku dosen pembahas pertama.
8. Bapak Reiki Nauli Harahap, M.A selaku dosen pembahas kedua.
9. Staf Tata Usaha dan Akademik beserta jurusan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
10. Bapak dan ibu informan yang sudah bersedia menjadi informan dan bersedia diwawancara dan memberikan informasi pendukung yang diperlukan oleh peneliti dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh peneliti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan memerlukan banyak perbaikan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi peningkatan kualitas penelitian pada tahap berikutnya.

Pontianak, Juni 2026

Dista Handayani
NIM.E1021221025

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN iv
LEMBAR PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
RINGKASAN SKRIPSI viii
PERNYATAAN KEASLIAN x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN xi
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xix
DAFTAR GAMBAR xx
DAFTAR LAMPIRAN xxi
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM xxii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 12
1.3 Fokus Penelitian 13
1.4 Rumusan Masalah 13
1.5 Tujuan Penelitian 13
1.6 Manfaat Penelitian 14
1.6.1 Manfaat Teoritis 14
1.6.2 Manfaat Praktis 14
BAB II 16
TINJAUAN PUSTAKA 16
2.1 Konsep Kolaborasi 16
2.2 Konsep Implementasi Kebijakan 24
2.3 Konsep Pengelolaan Sampah 28
2.4 Kajian Teori 35

2.4.1 Teori Kebijakan Sosial 35
2.5 Penelitian yang relevan 38
2.6 Alur Pikir Penelitian 42
BAB III 44
METODE PENELITIAN 44
3.1 Jenis Penelitian 44
3.2 Langkah-langkah Penelitian 45
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 49
3.3.1 Lokasi Penelitian 49
3.3.2 Waktu Penelitian 49
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 50
3.4.1 Subjek Penelitian 50
3.4.2 Objek Penelitian 52
3.5 Teknik Pengumpulan Data 53
3.6 Alat Pengumpulan Data 56
3.7 Analisis Data 57
3.8 Teknik Keabsahan Data 59
BAB IV 62
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 62
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sintang 62
4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Sintang 62
4.1.2 Topografi dan Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 63
4.1.3 Kondisi Demografis Kabupaten Sintang 64
4.2 Kondisi Aktual Kolaborasi Pengelolaan Sampah di Kota Sintang 68
4.2.1 Pelaksanaan Kolaborasi dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Sintang 70
4.3 Sumber Sampah di Kecamatan Sintang 73
4.4 Identitas Informan 75
BAB V 80
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 80
5.1 Bentuk Kolaborasi dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Baning Kecamatan Sintang.. 80

5.1.1 Sosialisasi 80
5.1.2 Kerja Bakti 84
5.1.3 Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas Kebersihan 87
5.1.4 Pengangkutan Sampah 90
5.2 Sintesis Temuan Lapangan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sintang 93
5.2.1 Ketepatan Perumusan Tujuan Kebijakan 99
5.2.2 Kapasitas dan Komitmen 101
BAB VI 106
6.1 Kesimpulan 106
6.2 Saran 107
6.3 Keterbatasan Dalam Penelitian 109
DAFTAR PUSTAKA 111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 38
Tabel 3.1 Waktu Penelitian 50
Tabel 3.2 Subjek Penelitian 52
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sintang pembaharuan 2026 67
Tabel 4.2 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis di Kabupaten Sintang Tahun 2022-2024 72
Tabel 4.3 Identitas Informan 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian..... 42
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Sintang.....68
Gambar 4.2 Komposisi Sampah Kabupaten Sintang Tahun 2024..... 72
Gambar 5.1 Armada Pengangkut Sampah..... 88
Gambar 5.2 Kerusakan Alat Berat..... 89
Gambar 5.3 Kartu Pelanggan Program Jasa Angkutan Sampah Rumah Tangga 92
Gambar 5.4 Plang Aturan Waktu Pembangunan Sampah.....95
Gambar 5.5 Bagan Visual Partisipasi dan Kolaborasi..... 105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara untuk Pejabat Dinas Lingkungan Hidup..... 119
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara..... 121
Lampiran 3 Dokumentasi TPS dan TPA 122
Lampiran 4 Biodata Penulis 124
Lampiran 5 Surat Tugas 125

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
SIPSN	: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jakstranas	: Kebijakan dan Strategi Nasional
DLHK	: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat
TPA	: Tempat Pemrosesan Akhir
TPS	: Tempat Pembuangan Sementara
Perbub	: Peraturan Bupati
Perda	: Perarturan Daerah
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
SDGs	: *Sustainable Development Goals*
LSM/NGO	: Lembaga swadaya masyarakat/*Non-Governmental Organization*
BPS	: Badan Pusat Statistik
SIPEDAS	: Sistem Informasi Penanaman Modal Kabupaten Sintang
LPM	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah adalah permasalahan global yang terjadi di setiap negara terutama di negara berkembang. Setiap tahun, jumlah sampah di hampir dunia mencapai sekitar 2,01 miliar ton, dan sekitar 33 persen dari sampah tersebut tidak dikelola dengan baik. Masalah sampah juga berdampak besar terhadap perubahan iklim dan pencemaran laut. Dampak ini terjadi karena mayoritas sampah, terutama tidak dikelola dengan tepat, dibakar di tempat terbuka atau dikeluarkan langsung ke lingkungan tanpa diolah secara benar. Membakar sampah menciptakan gas rumah kaca antara lain metana dan karbon dioksida, yang membuat pemanasan global semakin cepat. Sampah yang dibuang ke sungai dan laut menyebabkan air tercemar dan mengganggu kehidupan makhluk laut, terutama karena mikroplastik yang sulit terurai dan bisa masuk ke makanan manusia.

Permasalahan ini selain merugikan alam, juga mempengaruhi kesehatan masyarakat serta ekonomi, khususnya di wilayah yang belum memiliki sistem pengelolaan limbah yang efisien dan berkelanjutan (Axmalia & Mulasari, 2020). Di Indonesia, timbulan sampah mencapai kurang lebih 64 juta ton limbah setiap tahun, berlandaskan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), yang dipunyai dan dikendalikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sampah yang tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan masyarakat, dan kerusakan ekosistem baik di tanah

maupun di air (Utami et al., 2023). Mengingat pentingnya isu ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang pengelolaan sampah domestik skala nasional di Indonesia.

Peraturan ini menguraikan bahwa sampah adalah sisa-sisa padat dari aktivitas sehari-hari manusia dan/atau proses alami, yang masih dapat digunakan atau masih dalam kondisi yang bisa dimanfaatkan. Melalui Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga serta Sampah yang Serupa, ditentukan sasaran nasional untuk mengurangi sampah hingga 30% dan mengelola sampah sebanyak 70% di waktu yang akan datang. Perihal ini menunjukkan bahwa masalah sampah bukan sekadar masalah teknis, itu juga adalah bagian dari rancangan pembangunan nasional yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sampah adalah barang yang sudah tidak dipakai lagi oleh pemiliknya. Secara umum, sampah dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang bisa hancur secara alami dengan cepat, sedangkan sampah anorganik berasal dari aktivitas manusia yang sulit untuk dijabarkan sehingga memerlukan waktu yang lama untuk proses penguraian (Batubara et al., 2022).

Sampah dari rumah tangga, plastik, limbah industri, serta jenis limbah lainnya telah merusak lingkungan, membahayakan kesehatan masyarakat, dan berdampak negatif terhadap ekosistem darat dan laut. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, Sistem pengelolaan sampah masih menemui sejumlah

hambatan, seperti kurangnya infrastruktur, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, dan kurang efektifnya penerapan peraturan yang berhubungan. Menurut (Purnami, 2021) sampah bisa diartikan sebagai hasil dari kegiatan manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Manusia yaitu salah satu pihak yang berperan sebagai penghasil sampah karena setiap aktivitas yang dilaksanakan dapat menimbulkan timbulan sampah, dengan kata lain, setiap aktivitas manusia atau proses alam yang menghasilkan sisa buangan termasuk dalam kategori penghasil sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat menemukan bahwa Isu pengelolaan sampa tetap menjadi hambatan besar dalam mempertahankan mutu lingkungan di daerah tersebut. Berdasarkan data DLHK Kalbar penumpukan sampah di provinsi diperkirakan menghasilkan lebih dari 350 ton sampah per hari (Rachmadi et al., 2023). Jumlah tersebut, baru sekitar 20% yang terkelola secara optimal menurut standar pengelolaan yang baik. Sisanya sebagian besar berakhir di TPA terbuka atau tidak diolah secara layak. Berbagai program strategis telah dirancang oleh pemerintah provinsi, seperti pelatihan pengelolaan sampah, penerapan daur ulang, serta pengolahan sampah menjadi energi alternatif, sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan. Berbagai program strategis telah dirancang oleh pemerintah provinsi, seperti pelatihan pengelolaan sampah, penerapan daur ulang, serta pengolahan sampah menjadi energi alternatif, sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan, namun, kenyataannya Di lokasi menunjukkan bahwa pekerjaan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten masih sangat berat (Mildayati et al., 2021). Di Kabupaten Sintang, jumlah sampah yang

dibuang setiap hari sangat besar. Menurut pernyataan Kepala DLH Kabupaten Sintang menyatakan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan berkisar antara 350 hingga 400 ton setiap harinya, namun hanya sekitar 122 ton yang bisa ditangani. Artinya, sekitar 228 ton sampah tidak bisa ditangani secara optimal. Perihal ini terjadi karena keterbatasan fasilitas, anggaran yang minim, serta kapasitas operasional yang belum memadai (Markus, 2025).

Permasalahan lain yang dihadapi adalah bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sintang belum sepenuhnya mengikuti standar sanitary landfill. Situasi ini berisiko menimbulkan polusi pada tanah, sumber air tanah, serta dapat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, jangkauan layanan pengelolaan sampah masih minim, sehingga banyak area, terutama di pedesaan atau daerah pinggiran, tidak mendapatkan layanan pengangkutan dan pembuangan sampah yang memadai (Yuliyanti & Setiyaningrum, 2024). Masalah membuang sampah sembarangan masih menjadi isu yang sering terjadi. Kebiasaan ini masih banyak ditemui di berbagai wilayah, terutama di tempat permukiman padat, sepanjang jalan, tepi sungai, atau area terbuka. Perihal ini membuat tugas pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi semakin berat. Selain itu, fasilitas pengelolaan sampah seperti tempat penampungan sementara, pusat pemilahan, atau fasilitas pengolahan lanjutan, seperti tempat pengomposan atau instalasi daur ulang, masih terbatas baik jumlah maupun kualitasnya (Samin, 2024).

Menanggapi beragam masalah tersebut, Pemerintah telah mengambil berbagai langkah regulasi dan kebijakan untuk memperkuat pengelolaan sampah

di tingkat lokal. Salah satu peraturan yang dijadikan dasar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang mencakup aspek teknis, peran masyarakat, pendanaan, serta sanksi administratif. Sementara itu, Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sintang yang terbaru adalah Perbup Nomor 10 Tahun 2024. Perbup ini menetapkan tata cara pelaksanaan teknis pengelolaan sampah, termasuk pengaturan waktu pembuangan sampah oleh masyarakat. Tujuan Perbup ini memastikan kedisiplinan warga dalam pembuangan sampah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (antara pukul 18.00 hingga 06.00), menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi tumpukan sampah di jalan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dan kesehatan lingkungan. Pemerintah daerah juga memiliki Peraturan Daerah lainnya, seperti Perda No. 1 Tahun 2016 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi landasan hukum yang lebih luas untuk pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah telah mengalami pergeseran yang besar dalam beberapa tahun terakhir. Pada masa sebelumnya, pendekatan yang diterapkan bersifat administratif dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, saat ini pendekatan tersebut telah bergeser menuju konsep *governance*, yang menekankan pentingnya partisipasi berbagai aktor non-pemerintah dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Paradigma ini memandang pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab kolektif yang menuntut kolaborasi diantara seluruh pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, komunitas,

dunia usaha, dan organisasi non-pemerintah (Rizky et al., 2024). Pengelolaan sampah kini tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai urusan teknis yang sepenuhnya ditangani pemerintah daerah, meskipun pemerintah tetap memegang peran penting sebagai pembuat kebijakan dan penyedia layanan dasar, Keberhasilan dalam pengelolaan sampah sangat tergantung pada keterlibatan aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Masyarakat sebagai penghasil sampah memiliki tanggung jawab langsung untuk mengurangi, memilah, dan memproses sampah sejak awal. Di sisi lain, sektor swasta juga memiliki kemampuan dalam memberikan teknologi, dana, serta solusi inovatif untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang bersifat berkelanjutan. Prinsip ini mengikuti ketentuan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, terutama yang tercantum dalam Pasal 28 yang mengatur bahwa masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan sampah.

Aturan ini menegaskan bahwa Pengelolaan sampah bukan sekadar menjadi kewajiban pemerintah, namun juga memerlukan kolaborasi dari masyarakat. Cara terlibatnya masyarakat bisa dilaksanakan melalui tindakan *reduce, reuse,* dan *recycle* (3R), yang dimulai dari tingkat rumah tangga sebagai unit penghasil sampah terkecil. Untuk mencapai kerja sama yang efektif antar berbagai pihak, pendekatan pengelolaan sampah dengan model kolaborasi sangat relevan dan strategis. Model ini melibatkan berbagai pihak dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan secara bersama, agar bisa menghasilkan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan prinsip kesetaraan, komunikasi yang terbuka, dan adanya kepercayaan satu sama lain di antara semua

pihak yang terlibat. Pengelolaan sampah di Kabupaten Sintang masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang mencakup aspek teknis, kelembagaan, serta tingkat partisipasi masyarakat. Penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan sampah yang berbasis kolaborasi telah diterapkan, serta seberapa efektif kebijakan ini berhasil membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Studi ini dilaksanakan untuk menganalisis proses penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Sintang dengan pendekatan pengelolaan kolaboratif, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan kerja sama dalam situasi tersebut.

Permasalahan pengelolaan sampah tersebut juga menjadi perhatian di Kelurahan Baning Kecamatan Sintang yang merupakan salah satu wilayah permukiman dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Berdasarkan data profil Kelurahan Baning, jumlah penduduk tercatat sebanyak 8.854 jiwa yang tergabung dalam 3.058 kepala keluarga, terdiri atas 2.650 kepala keluarga laki-laki dan 408 kepala keluarga perempuan. Jumlah penduduk dan kepala keluarga yang cukup besar tersebut berpotensi meningkatkan volume sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kelurahan Baning tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan permasalahan seperti rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam pengelolaan sampah dan masih adanya kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, petugas kebersihan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung

keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Baning Kecamatan Sintang.

Praktik kolaborasi pemerintah dan masyarakat Kelurahan Baning Kecamatan Sintang dalam pengelolaan sampah memang telah berjalan, namun pelaksanaannya belum mencapai tingkat optimal. Bentuk kolaborasi tersebut beragam, mencakup kerja sama dengan bank sampah, serta koordinasi diantara DLH dengan berbagai pemangku kepentingan. Beberapa program kolaboratif yang telah diterapkan antara lain pembentukan program angkutan jasa sampah rumah tangga di tingkat kelurahan meskipun tidak seluruhnya beroperasi secara aktif.

Fenomena yang menonjol dalam perihal ini adalah masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, kurang intensifnya koordinasi antarpihak, serta adanya kendala lain seperti perbedaan kepentingan. Program pengelolaan sampah di Sintang masih dalam tahap terbatas dan belum mencapai tingkat optimal. Meskipun sudah ada beberapa upaya, seperti pembentukan bank sampah dan kerja sama dengan pihak swasta serta organisasi non-pemerintah, hasilnya belum memberikan dampak besar terhadap penurunan volume sampah atau peningkatan kesadaran masyarakat. Beberapa bank sampah masih kurang berfungsi karena kurangnya bantuan dan partisipasi masyarakat. Koordinasi antarlembaga juga masih kurang baik, sehingga program sering kali hanya berjalan sebagian dan tidak berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam pemilahan sampah di sumber dan keterbatasan sumber daya serta dana juga jadi hambatan. Meski arah kebijakan kolaboratif sudah mulai terlihat, masih perlu peningkatan dalam hal

koordinasi, peningkatan kemampuan lembaga, serta meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, kolaborasi dalam pengelolaan sampah menunjukkan Menempati posisi penting dalam upaya meningkatkan efektivitas serta menjaga keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup.

Kolaborasi multi-stakeholder yang efektif mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, keberlanjutan program, efisiensi operasional, serta keberhasilan dalam mengurangi sampah dan meningkatkan pemahaman masyarakat (Zein et al., 2024). Selaras dengan temuan tersebut (Putri et al., 2025) menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan limbah, yang dinilai sebagai strategi efektif untuk mencapai tujuan SDGs nomor 12 berkaitan dengan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta SDGs ke-17 tentang kemitraan yang inklusif dan kolaboratif.

(Pamungkas et al., 2024) dalam penelitiannya tentang *collaborative governance* di Kabupaten Jember, mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat dalam implementasi kolaborasi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah ketidakseimbangan kekuasaan dan sumber daya antar aktor, tidak diperbaharuinya perjanjian kerja sama, dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan serta penyediaan bahan baku. Perihal ini menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi dianggap penting, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan teknis dan kelembagaan.

Penelitian Tanuwijaya (2016) mengungkapkan bahwa partisipasi dalam program bank sampah masih rendah akibat faktor ekonomi, sosial, psikologis,

serta lemahnya dukungan dan komunikasi dari pemerintah maupun pengelola program. Namun, (Sasoko, 2024) menunjukkan bahwa ketika partisipasi masyarakat aktif, terutama dalam program bank sampah, hal tersebut mampu meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah, mengurangi timbulan sampah, menjaga kebersihan lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi yang turut mendorong keberlanjutan program. Di sisi lain, berbagai penelitian juga menggarisbawahi kendala struktural yang menghambat pengelolaan sampah. (Toif Fadzoli et al., 2023) menyoroti bahwa kebijakan daerah masih belum optimal karena keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, ketidaksesuaian fasilitas TPS dengan standar, serta ketiadaan mekanisme dan alat daur ulang yang memadai. Kendala serupa juga ditemukan oleh Okhtafianny dan Ariani (2023) dalam konteks Kota Payakumbuh, di mana keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk pengelolaan sampah yang sesuai.

Penurunan anggaran dari tahun ke tahun bahkan berdampak pada berkurangnya intensitas kegiatan pengelolaan sampah. Dari berbagai studi yang telah dikemukakan, terlihat bahwa sebagian besar penelitian hanya menyoroti salah satu aktor dalam kolaborasi pengelolaan sampah, yakni pemerintah atau masyarakat. Beberapa penelitian juga terfokus pada program-program tertentu seperti bank sampah atau TPS 3R, sehingga pemahaman tentang dinamika kolaborasi secara menyeluruh antara pemerintah khususnya DLH dan masyarakat belum tergambarkan secara utuh. Kajian yang secara khusus mengulas bentuk, mekanisme, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi diantara DLH dan

masyarakat masih sangat terbatas. Hingga kini, belum ada studi yang dengan jelas mengkaji kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sintang. Tidak ada studi yang mendalami bagaimana bentuk interaksi diantara DLH dan masyarakat dalam konteks lokal tersebut, bagaimana mekanisme kolaborasi dibangun dan dijalankan, serta apa saja faktor yang menghalangi atau mendukung kesuksesannya. Sehingga, studi ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan memberikan analisis komprehensif mengenai dinamika kolaborasi dalam pengelolaan sampah antara DLH dan masyarakat di Kabupaten Sintang.

Studi ini diupayakan bisa berkontribusi empiris bagi perancangan model kolaboratif pengelolaan sampah yang tidak sekadar efektif, namun juga adaptif terhadap konteks lokal dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Studi ini sangat penting dari berbagai aspek, yaitu akademis, praktis, dan kebijakan. Secara akademis, Tujuan studi ini untuk menambahkan pengetahuan tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah, terutama di tingkat daerah yang sampai saat ini belum banyak dibahas secara mendalam. Hasil dari studi ini diupayakan bisa memberikan sejumlah saran praktis untuk memperkuat kolaborasi diantara DLH dan masyarakat di Kabupaten Sintang, agar pengelolaan sampah bisa lebih efektif dan berkelanjutan, dalam hal kebijakan, temuan studi ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah daerah, khususnya DLH, dalam merancang dan menjalankan program pengelolaan sampah yang lebih melibatkan masyarakat dan mengikuti kondisi lokal. Disamping itu, studi ini

juga memiliki potensi untuk menghasilkan model kerja sama yang bisa diterapkan di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Studi ini berkontribusi terhadap pencapaian target pengelolaan sampah nasional melalui penguatan kolaborasi diantara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengurangan timbulan sampah, peningkatan daur ulang, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Secara langsung, perihal ini mendukung SDGs Goal 11 dengan mendorong terwujudnya kota dan komunitas yang bersih, aman, dan berkelanjutan, serta Goal 12 melalui pengembangan pola pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab berbasis partisipasi serta kolaborasi berbagai pihak.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yakni:

1. Kondisi awal yang tidak setara terlihat dari tingginya timbulan sampah yang tidak tertangani serta TPA yang belum memenuhi standar, sehingga menciptakan titik awal kolaborasi yang lemah dan menghambat pembentukan kepercayaan antarpihak dalam kolaborasi.
2. Partisipasi masyarakat yang rendah dalam pemilahan sampah, pengembangan bank sampah, dan penerapan 3R menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif pemerintah belum cukup mendorong keterlibatan aktif masyarakat, sehingga proses kolaborasi tidak berkembang optimal.

3. Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah melemahkan desain kelembagaan dan proses kolaborasi karena sarana pendukung yang minim menghambat koordinasi, pembagian peran, serta keberlanjutan program pengelolaan sampah secara kolaboratif di Kabupaten Sintang.

1.3 Fokus Penelitian

Studi ini terfokus pada analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis kolaborasi di Kelurahan Baning Kecamatan Sintang, dengan menitikberatkan pada peran DLH sebagai instansi pelaksana, serta keterlibatan aktor-aktor lain seperti masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Fokus penelitian mencakup identifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan, peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan, serta faktor-faktor yang berperan dalam menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan partisipatif.

1.4 Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk kolaborasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Baning Kecamatan Sintang?

1.5 Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kolaborasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Baning Kecamatan Sintang.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Studi ini mengharapkan dapat memperluas pemahaman tentang penerapan kebijakan publik yang melibatkan banyak pihak secara bersama-sama dalam mengelola lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan sampah di tingkat daerah, dengan melihat kajian ini, kita bisa tahu lebih jelas bagaimana kerja sama antar pihak berlangsung, serta dinamika yang terjadi saat kebijakan diterapkan di lapangan. Selain itu, studi ini juga bisa menjadi bahan referensi bagi pengembangan kajian lintas disiplin tentang pengelolaan kolaboratif, yang bisa diterapkan dalam isu lingkungan lainnya di daerah dengan kondisi serupa.

1.6.2 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten Sintang (DLH) Hasil studi ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2015 dan Perbup No. 10 Tahun 2024 tentang pengelolaan sampah, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat mekanisme kolaborasi antaraktor, koordinasi lintas lembaga, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Bagi masyarakat, studi ini memberikan wawasan tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah berbasis kolaborasi, sekaligus mendorong tumbuhnya Kesadaran dan komitmen kolektif dalam menjaga

kebersihan lingkungan. melalui partisipasi nyata dalam kegiatan 3R, bank sampah, dan forum komunikasi lingkungan di tingkat lokal.

Bagi Pemerintah Daerah Lain studi ini dapat dijadikan *best practice* bagi pemerintah daerah lain yang menghadapi persoalan serupa, khususnya dalam merancang model kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Bagi Peneliti Selanjutnya studi ini dapat menjadi landasan empiris (*baseline study*) bagi penelitian lanjutan yang terfokus pada evaluasi kolaboratif, efektivitas kebijakan lingkungan, serta pengembangan model kolaborasi multi-aktor dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkesinambungan di tingkat daerah.